



FIQIH QURBAN; ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG RUMAH PEMOTONGAN HEWAN (RPH) KURBAN PADA MASA WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK)

Lasan

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiyah Sumber Duko Pamekasan

Email: lasanmasduqi@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini maka peneliti berinisiatif untuk menggali regulasi regulasi yang pernah dilakukan oleh pihak pemerintah terkait dengan penekanan perkembangan wabah PMK di pulau Madura, peraturan bupati yang berkaitan dengan perumusan implementasi dan evaluasi kebijakan terkait dengan PMK yang meliputi didalamnya membahas tentang bagaimana penerbitan Surat Keterangan Sehat hewan Yang memenuhi kriteria sesuai dengan aturan dan ketetapan rumah penyembelihan hewan (RPH). keputusan sah tidaknya hewan kurban yang terinfeksi PMK. *Pertama*, Tidak sah apabila hewan tersebut sudah dengan gejala klinis berat. Gejala klinis berat dalam hal ini bisa dilihat dari kuku hewan yang sudah melepuh atau copot dan atau menyebabkan pincang/tidak bisa berjalan. *Kedua*, Sah kurbannya apabila hewan tersebut hanya dengan gejala klinis kategori ringan. Yang masuk dalam kategori ringan dalam hal ini misalnya kuku hewan hanya melepuh ringan, mengakibatkan lesu, hewan jadi tidak nafsu makan atau air liur yang lebih banyak dari biasanya. *Ketiga*, Apabila virus pada hewan yang sudah ditentukan menjadi hewan kurban tersebut sembuh setelah masa penyembelihan, yakni setelah tanggal 13 Dzulhijjah, misalnya pada tanggal 14 dan atau setelahnya, maka sembelihan hewan tersebut dihitung sedekah, bukan lagi kurban.

Kata Kunci: Fiqih qurban, Kebijakan, Penyakit Mulut dan Kuku

Abstract: In this research, the researcher took the initiative to explore regulations that have been implemented by the government related to suppressing the development of the FMD outbreak on the island of Madura, regent regulations related to the formulation of implementation and evaluation of policies related to PMK which includes discussing how to issue animal health certificates. meet the criteria in accordance with the rules and regulations of the animal slaughterhouse (RPH). decision whether sacrificial animals infected with FMD are valid or not. Firstly, it is not valid if the animal already has severe clinical symptoms. Severe clinical symptoms in



this case can be seen from the animal's nails blistering or falling off and/or causing limping/inability to walk. Second, the sacrifice is valid if the animal only has mild clinical symptoms. What is included in the mild category, for example, is that the animal's nails are only mildly blistered, resulting in lethargy, the animal has no appetite or drools more than usual. Third, if the virus in an animal that has been determined to be a sacrificial animal recovers after the slaughter period, namely after the 13th of Dzulhijjah, for example on the 14th and/or after, then the slaughter of the animal is counted as alms, no longer a sacrifice.

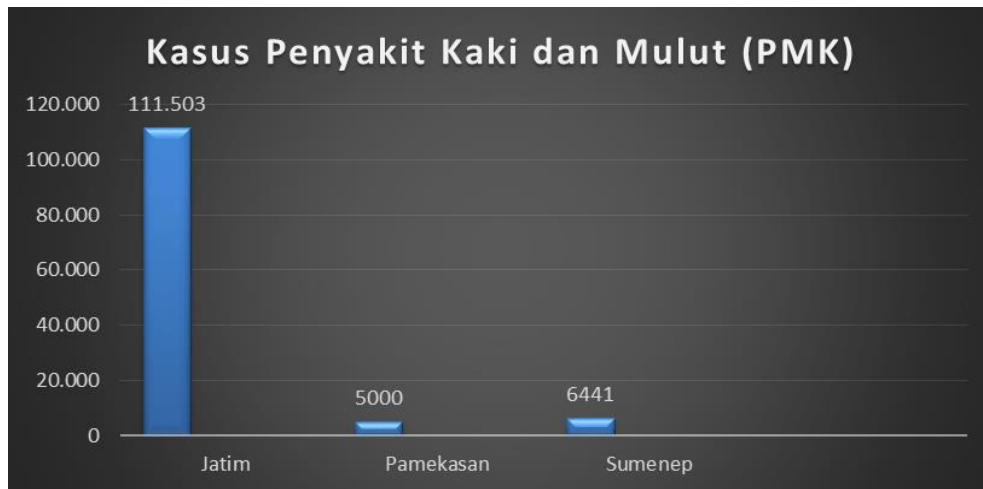
Keywords : *Fiqh of sacrifice, Policy, Foot and Mouth Disease.*

Pendahuluan

Pelaksanaan ibadah qurban dalam Islam bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan berbagi dengan sesama, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Qurban, yang merupakan ibadah yang dilakukan pada Hari Raya Idul Adha, melibatkan penyembelihan hewan seperti sapi, kambing, atau domba, yang diharapkan dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Dalam pelaksanaan ibadah ini, terdapat tata cara yang jelas terkait dengan pemilihan hewan, proses pemotongan, dan distribusi daging kepada masyarakat. Namun, praktik ini dapat terpengaruh oleh berbagai kondisi eksternal, salah satunya adalah wabah penyakit, seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), yang berdampak signifikan terhadap sektor peternakan dan kebijakan pemerintah dalam mengatur Rumah Pemotongan Hewan (RPH).

Menyusul merebaknya penyakit PMK, yang menular dengan cepat di kalangan hewan ternak, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam melindungi kesehatan hewan serta kestabilan ekonomi peternak. Penelitian menunjukkan bahwa PMK merupakan infeksi virus yang sangat menular dan dapat menyebabkan kerugian besar bagi peternak akibat kematian hewan ternak dan penurunan produksi (Firman et al., 2022). Wabah ini menciptakan ketakutan di masyarakat mengenai kesehatan hewan yang hendak dikurbankan, yang dapat mengarah pada penurunan permintaan hewan qurban dan berimbas pada pelaksanaan ibadah tersebut (Rohma et al., 2022).

Dalam konteks penyelenggaraan ibadah qurban selama masa wabah PMK, terdapat berbagai permasalahan yang perlu diidentifikasi dan ditangani. Pertama, bagaimana pemilihan hewan kurban dapat dilakukan dengan mematuhi syariat Islam sambil memastikan kesehatan hewan yang akan disembelih? Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen belum sepenuhnya mengetahui cara mengecek kesehatan hewan dan mengandalkan penjual atau panitia kurban (Hariati et al., 2023). Kedua, apa saja dampak dari kebijakan pemerintah terhadap RPH dalam menjamin keamanan dan kesehatan daging hewan kurban yang dihasilkan pada masa wabah PMK? Dalam hal ini, pemerintah berperan untuk mengatur protokol kesehatan yang ketat dalam RPH dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilihan hewan kurban yang sehat (Umatin et al., 2022).



Ketiga, bagaimana pengaruh wabah PMK terhadap kondisi ekonomi para peternak? Wabah ini tidak hanya berdampak pada populasi hewan, tetapi juga menjadikan pendapatan para peternak menurun drastis. Penelitian menunjukkan bahwa banyak peternak yang terpaksa menjual hewan ternaknya dengan harga di bawah pasar karena masalah kesehatan dan proyeksi risiko kerugian jika tidak segera terjual (Sulistiyati et al., 2024). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam merespons wabah ini dan strategi yang harus diterapkan untuk meminimalisasi dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan (Khotimah et al., 2024).

Gabungan penelitian ini berfokus pada dua aspek utama: analisis terhadap kebijakan pemerintah terkait prosedur dan praktik dalam RPH selama wabah PMK, dan perilaku masyarakat serta peternak dalam memilih hewan kurban yang sehat. Melalui analisis kebijakan tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang aplikatif dalam mendukung pelaksanaan ibadah qurban yang sesuai syariat, sekaligus aman dari pandangan kesehatan dan keberlanjutan ekonomi peternakan (Apriantoro et al., 2023). Hal ini mencakup edukasi kepada masyarakat tentang penyakit PMK dan perilaku memeriksa kesehatan hewan kurban sebelum membeli, agar pelaksanaan ibadah qurban tetap aman dan sesuai dengan syariat, meskipun dalam kondisi yang menantang.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan dampaknya, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi masyarakat dalam melaksanakan ibadah qurban yang sehat dan sesuai, serta memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam mengoptimalkan RPH dan perlindungan kepada para peternak selama wabah penyakit menular ini berlangsung.

Kondisi yang dihadapi oleh masyarakat dan peternak tidak hanya terkait dengan aspek kesehatan hewan, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan spiritual dan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk menjembatani antara pemahaman fiqih qurban, kondisi kesehatan hewan, dan kebijakan pemerintah dalam upaya menciptakan ekosistem yang harmonis di tengah permasalahan yang kompleks ini.



Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif, Deskripsikan temuan penelitian melalui deskriptif analisis dengan mengekspresikan peristiwa peristiwa secara utuh dan komprehensif, interpretasi dan sudut pandang responden. Penelitian ini menganalisis secara komprehensif Bentuk-bentuk regulasi Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep terkait dengan perumusan kebijakan implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan pemerintah tentang Rumah Potong Hewan pada masa wabah PMK (Sugiyono, 2012).

Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan karena keterlibatan peneliti berfungsi sebagai sebagai pengumpul data dan sekaligus instrumen utama yang aktif dalam upaya mengumpulkan data di lapangan dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap subyek yang akan diteliti atau melalui informan. Oleh karena itu, kehadiran peneliti secara langsung di lapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami kasus yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung dan aktif dengan informan atau sumber data lainnya mutlak diperlukan.

Lokasi penelitian dan Sumber datanya, Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur sebagai lokus penelitian bahwa Kabupaten Pamekasan mempunyai kearifan lokal yang unik dalam merespon wabah penyakit mulut dan kuku khususnya di pasar Keppo Galis pamekasan.

Adapun alasan lain yang menjadikan peneliti memilih Kabupaten Pamekasan diantaranya adalah: *pertama*, bahwa kearifan lokal yang unik dalam merespon wabah penyakit mulut dan kuku khususnya di pasar Keppo Galis pamekasan. *Kedua*, sampai saat ini pemerintah/Bupati Kabupaten Sampang belum bersedia menutup pasar keppo sebagai komunitas pasar sapi pada waktu wabah PMK. *Ketiga*, mencari jawaban yang komprehensif fungsi dan peran serta tugas Dokter Hewan penyelia, dan Juru Penjual Hewan (Juleha).

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Regulasi Pemerintah Kabupaten Pamekasan tentang Rumah Potongan Hewan (RPH) Kurban pada masa wabah PMK

Pemerintah Kabupaten Pamekasan menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengatur dan mengawasi rumah pemotongan hewan (RPH) selama wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Regulasi yang diberlakukan bertujuan untuk melindungi kesehatan konsumen serta memastikan praktik penyembelihan hewan kurban berlangsung dengan aman dan sesuai dengan standar halal. Kebijakan yang ada saat ini didasarkan pada prinsip manajemen ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) dan prinsip HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah (Mail et al., 2021).

Dalam konteks pandemi PMK, pengawasan yang ketat terhadap kesehatan hewan menjadi prioritas utama. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa 100% ternak sapi dan domba yang diperiksa dalam kondisi sehat sebelum penyembelihan. Namun, ada indikasi bahwa 24% dari ternak sapi menunjukkan gejala fasciolosis ringan saat pasca pemotongan, yang menunjukkan perlunya penguatan dalam sistem monitoring dan pemeriksaan kesehatan hewan (Rahmi et al., 2024a). Ini



mendorong perlunya peningkatan penerapan protokol hygiene dan sanitasi pada para panitia pemotongan kurban untuk menjaga kualitas daging yang akan dibagikan kepada Masyarakat (Rahmi et al., 2024a).

Regulasi tersebut juga mencakup prosedur pemeriksaan kesehatan hewan yang dilakukan di RPH yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memastikan kesehatan hewan kurban. Kegiatan pemeriksaan antemortem dan postmortem di RPH harus dilakukan dengan ketat untuk memastikan tidak ada penyakit zoonosis yang ikut terbawa dalam daging kurban yang didistribusikan kepada masyarakat. Penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat perlu diberikan edukasi terkait risiko penyakit yang mungkin terdapat pada hewan kurban dan pentingnya tahap pemeriksaan ini dalam menjamin keamanan produk hewani (Safitri et al., 2024).

Selama pandemi, kegiatan penyembelihan hewan kurban tidak hanya dilakukan di RPH, tetapi juga di lokasi lain seperti masjid dengan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kegiatan ini menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, yang memberikan jaminan kepada umat Islam dalam menjalankan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha (Wardhani et al., 2022). Dengan demikian, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat dalam mengawasi dan mengimplementasikan regulasi menjadi sangat vital.

Regulasi ini tidak terlepas dari tantangan dalam pelaksanaan. Di lapangan, masih terdapat kendala seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemotongan hewan yang sesuai dengan protokol kesehatan dan manajemen halal. Dalam hal ini, perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut untuk membekali masyarakat, khususnya panitia pelaksana, dengan informasi yang memadai terkait prosedur penyembelihan yang benar dan sesuai dengan syarak (Arif et al., 2021).

Diskusi mengenai implementasi regulasi RPH di Pamekasan juga mengungkapkan bahwa pihak berwenang, termasuk dinas pertanian dan kesehatan hewan, harus proaktif dalam mengawasi RPH dan lokasi pemotongan alternatif untuk menjaga komitmen terhadap keamanan pangan. Penelitian membuktikan bahwa semua proses dari penyembelihan, pengulitan, hingga distribusi daging kurban haruslah diawasi untuk memastikan semua berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan (Rahmi et al., 2024b).

Dalam konteks ini, penting juga untuk menekankan peran Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) yang bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan pemotongan hewan kurban. Penelitian menunjukkan bahwa DKM dapat berperan sebagai penggerak edukasi di tengah masyarakat mengenai pentingnya pemotongan hewan yang sesuai dengan standar kesehatan dan syarak, terutama di masa-masa sulit seperti pandemi (Arif et al., 2021).

Lebih jauh, hasil dari pemeriksaan kesehatan hewan di berbagai daerah pada saat pemotongan kurban menunjukkan bahwa walaupun banyak hewan kurban dalam kondisi baik untuk disembelih, masalah penyakit masih menjadi perhatian utama. Penyakit seperti fasciolosis yang ditemukan pada pemeriksaan postmortem menuntut perhatian ekstra dalam pengaturan dan pengawasan di setiap tahap



pemotongan. Komunikasi antara petugas kesehatan hewan dan panitia kurban perlu ditingkatkan untuk mengidentifikasi dan menangani potensi masalah kesehatan lebih awal (Budiono et al., 2023).

Ketika mempertimbangkan aspek sosial dan kultural, penting untuk memahami bahwa pemotongan hewan kurban merupakan ritual yang mendalam dalam tradisi Islam. Oleh karena itu, regulasi yang diterbitkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai tradisional dan sosial masyarakat ketika diterapkan. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan kurban tidak hanya melibatkan pemotongan tetapi juga pendistribusian daging yang perlu diawasi agar tetap memenuhi norma sosial dan keagamaan (Abbas et al., 2019).

Dalam konteks kebijakan, regulasi harus dirancang agar bersifat adaptif dan responsif terhadap dinamika yang berubah, serta mampu menanggapi situasi darurat seperti wabah penyakit. Implementasi peraturan harus melibatkan keterlibatan dan dukungan dari semua pemangku kepentingan terkait untuk menciptakan sistem yang efektif, aman, dan berkelanjutan dalam pengelolaan RPH selama masa wabah PMK (Salurante, 2020). Upaya ini tidak hanya menjamin kesehatan masyarakat tetapi juga memperkuat kepercayaan mereka terhadap sistem pengawasan pemerintah dalam bidang kesehatan hewan dan keamanan pangan.

Di akhir pembahasan ini, kajian tentang regulasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan terhadap RPH dalam konteks kurban di tengah wabah PMK menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memfasilitasi edukasi, pengawasan, dan kolaborasi lintas sektor yang lebih baik. Hal ini tidak hanya akan memastikan pelaksanaan ibadah kurban yang sesuai dengan syarak tetapi juga mengurangi risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat praktik pemotongan yang tidak higienis atau tidak sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Kesadaran dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat juga sangat berperan dalam keberhasilan implementasi regulasi yang ada dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat dan kualitas daging kurban.

Implementasi Pemerintah Kabupaten Pamekasan tentang Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kurban pada masa wabah PMK

Implementasi Pemerintah Kabupaten Pamekasan terkait Rumah Pemotongan Hewan (RPH) selama wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merupakan suatu langkah yang kompleks dalam konteks kebijakan publik dan manajemen kesehatan hewan. Dalam melakukan pemotongan hewan kurban pada masa wabah PMK, pemerintah menghadapi tantangan terkait kesehatan masyarakat, standar halal dalam penyembelihan, serta pengelolaan logistik dan limbah. Pada bagian ini, kita akan membahas implementasi kebijakan tersebut dengan merujuk pada beberapa kajian sebelumnya yang relevan.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan menghadapi tantangan berarti terkait kesehatan hewan, terutama dalam konteks wabah PMK. Penelitian yang dilakukan oleh Dayana *et al.* menunjukkan bahwa aplikasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di RPH krusial untuk memastikan bahwa pemotongan hewan dilakukan sesuai dengan standar kesehatan dan kebersihan, guna mencegah penyebaran penyakit



seperti PMK (Anak Agung Putri Isadela Dayana et al., 2019). Implementasi prosedur kesehatan dan kebersihan di RPH selama wabah juga penting untuk menjaga kualitas daging yang diproduksi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus menyiapkan berbagai alat dan fasilitas di RPH agar sesuai dengan standar kesehatan. Penerapan manajemen air limbah di Rumah Potong Hewan menunjukkan perlunya peningkatan fasilitas guna mencapai standar yang diinginkan (Herman et al., 2023). RPH bertanggung jawab tidak hanya atas penyembelihan hewan namun juga terhadap dampak lingkungan dari operasional mereka, yang diperburuk oleh wabah PMK yang mempengaruhi keseluruhan ekosistem ternak di daerah tersebut.

Dari aspek logistik, Sayuti *et al.* mencatat bahwa penerapan halal logistic dalam distribusi daging di daerah lain, seperti Kabupaten Karawang, menggarisbawahi pentingnya proses yang sesuai agar produk daging kurban tetap halal dan berkualitas tinggi (Sayuti et al., 2021). Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Pamekasan harus mengadopsi pendekatan serupa untuk memastikan distribusi daging kurban tidak hanya memenuhi syarat halal tetapi juga dapat diterima oleh konsumen sambil tetap menjaga kesehatan masyarakat di tengah wabah ini.

Salah satu tantangan utama adalah menangani sanitasi pasca pemotongan hewan dalam situasi PMK. Rachmadin dan Fitria menunjukkan bahwa standar penyembelihan halalan memerlukan prosedur yang ketat untuk menjamin bahwa hewan yang dipotong tidak membawa virus atau bakteri yang berbahaya (Rachmadin & Fitria, 2024). Oleh karena itu, pentingnya penataan ulang prosedur operasional standar menjadi mendesak, termasuk pelatihan untuk juru sembelih halal sebagai bagian dari implementasi untuk menjaga kesehatan produk daging.

Dalam konteks masyarakat, kesadaran mengenai pentingnya pemotongan halal dan kesehatan hewan juga perlu diperhatikan. Penelitian oleh Purba *et al.* menunjukkan bahwa pemahaman yang baik dan pendidikan masyarakat dapat meningkatkan kualitas layanan di bidang kesehatan, yang juga relevan dalam konteks layanan di RPH (Purba et al., 2023). Oleh karena itu, upaya perlu dilakukan untuk mengedukasi masyarakat serta pemangku kepentingan tentang fungsi RPH dalam komunitas.

Melihat ke depan, tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam pengelolaan RPH mencakup mengikuti aturan yang meningkat sebagai respons terhadap keamanan dan kesejahteraan hewan selama masa wabah PMK. RPH tidak hanya penting dari sisi ekonomi tetapi juga sebagai elemen vital dalam menjamin kesehatan masyarakat dan hewan (Dwijayanti et al., 2022). Kebijakan berbasis data yang akurat, termasuk dalam pengawasan dan penegakan hukum, sangat vital untuk memastikan keberhasilan implementasi program pemotongan hewan di RPH.

Melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan bisa meningkatkan kualitas dan nilai daging yang dihasilkan, sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memilih produk daging yang bermutu tinggi dan aman dikonsumsi (Hasanah et al., 2024). Penelitian-penelitian sebelumnya menekankan aspek kolaboratif ini, karena keberhasilan kebijakan tergantung pada partisipasi proaktif masyarakat dan



pemangku kepentingan dalam mendukung kesehatan dan kebersihan di RPH.

Implementasi Pemerintah Kabupaten Pamekasan terkait RPH kurban selama wabah PMK adalah proses yang melibatkan banyak elemen. Dari pemantauan kesehatan hewan hingga standar halal, serta pengelolaan limbah, semua itu berkontribusi pada suksesnya layanan yang aman dan berkualitas bagi masyarakat. Penguatan kebijakan, pendidikan masyarakat, serta pengelolaan yang baik menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan operasional RPH di tengah situasi yang menantang ini.

Evaluasi Pemerintah Kabupaten Pamekasan tentang Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kurban pada masa wabah PMK

Dalam melakukan evaluasi terhadap Rumah Pemotongan Hewan (RPH) kurban di Kabupaten Pamekasan pada masa wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan praktik pemotongan hewan, sanitasi, serta penerapan standar operasional yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. RPH memainkan peranan penting dalam memastikan kualitas dan keamanan daging yang akan dikonsumsi oleh masyarakat, terutama pada momen-momen tertentu seperti Idul Adha, ketika permintaan akan daging kurban meningkat.

Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan adalah penerapan prinsip-prinsip bisnis Islam dalam RPH sebagai indikator keberhasilan terhadap aspek etika bisnis dan keberlanjutan sosial. Penelitian oleh Julvianita et al. menegaskan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis seperti halal, keadilan, serta kepedulian sosial telah dilaksanakan dengan baik di RPH, dengan fokus pada perlindungan hewan dan kebersihan sebagai perhatian utama (Julvianita et al., 2023). Dengan demikian, pengelolaan pemotongan hewan mencakup aspek efisiensi serta moral dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks wabah PMK, perhatian ini menjadi lebih mendesak mengingat tantangan yang dihadapi dalam menjaga kesehatan hewan yang dipotong dan mencegah penularan penyakit kepada manusia.

Evaluasi juga harus menganalisis dampak wabah PMK terhadap manajemen limbah di RPH. Suparni *et al.* menggambarkan pentingnya pengelolaan limbah infeksius selama pandemi, seperti limbah dari pemotongan hewan yang terinfeksi. Prosedur yang baik dalam pengelolaan limbah dapat mengurangi risiko penyebaran penyakit dan pencemaran lingkungan (Suparni et al., 2022). Oleh karena itu, evaluasi RPH di Pamekasan harus melibatkan pemeriksaan berikut terhadap sistem manajemen limbah dan pemusnahan yang aman guna memastikan bahwa tidak ada risiko tambahan bagi masyarakat setelah pemotongan.

Penerapan *Good Manufacturing Practice* (GMP) dan sanitasi dalam operasional RPH juga merupakan titik penting dalam evaluasi. Menurut penelitian oleh Nurjanah et al., penerapan GMP dan standar operasional sanitasi di RPH berpengaruh signifikan terhadap kualitas produk daging. Dalam situasi wabah PMK, standarisasi ini tidak hanya penting untuk memastikan produk aman untuk dikonsumsi tetapi juga untuk menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai keamanan pangan selama pandemi (Nurjanah et al., 2020). RPH yang mematuhi standar GMP dan melakukan sanitasi secara teratur cenderung memiliki reputasi

yang lebih baik di mata konsumen dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dampak dari wabah PMK terhadap persepsi masyarakat juga perlu diperhatikan. Penelitian oleh Rahayu *et al.* menunjukkan bahwa masyarakat memiliki berbagai persepsi terhadap keberadaan RPH, termasuk faktor bau, suara, dan pengelolaan limbah. Hal ini mencerminkan pentingnya komunikasi yang baik antara pengelola RPH dan masyarakat untuk mengurangi ketidaknyamanan serta meningkatkan pemahaman mengenai prosedur dan praktik yang aman selama proses pemotongan hewan (Rahayu *et al.*, 2023). Peningkatan komunikasi dapat membantu meredakan ketakutan masyarakat terkait potensi penularan penyakit selama wabah PMK.

Selain itu, evaluasi terhadap penerapan prosedur keselamatan kerja di RPH selama wabah PMK sangatlah penting. Priyono dan Yuamita menggarisbawahi bahwa petugas RPH perlu pendidikan terkait kesehatan serta kesadaran mengenai risiko emosional dan fisik yang ada (Pujiyanti *et al.*, 2023). Ketika wabah terjadi, penting bagi petugas di RPH untuk dilatih dalam mengenali gejala penyakit hewan dan prosedur aman untuk menjamin keselamatan mereka dalam menjalankan tugas sehari-hari. Ini akan membantu menjaga kesehatan petugas serta kualitas pemotongan hewan di RPH.

Dalam situasi wabah seperti PMK, terdapat tanggung jawab tambahan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap RPH. Kementerian Pertanian, melalui peraturan perundangan yang ada, mengimplikasikan kewajiban untuk melakukan inspeksi di setiap RPH guna memastikan bahwa semua tahapan pemotongan memenuhi standar kesehatan masyarakat, termasuk metode pemotongan yang tepat dan pengelolaan limbah yang efisien (I Made Gede Wijaya Kusuma *et al.*, 2023). Hal ini sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah terjadinya wabah lebih lanjut.

Secara keseluruhan, evaluasi pemerintah Kabupaten Pamekasan terhadap RPH kurban pada masa wabah PMK perlu dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek yang saling terkait, termasuk etika bisnis, sanitasi, manajemen limbah, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan pemerintah dapat mengatasi tantangan yang muncul selama wabah, memastikan ketersediaan daging yang aman dan berkualitas, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemotongan hewan di RPH.

Ada beberapa langkah dan metode pencegahan menular pada penyakit mulut dan kuku diantaranya adalah biosecurity barang kandang kendaraan atau disinfeksi, kedua adalah biosecurity peternak melalui metode mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun serta mengganti pakaian setelah melakukan aktivitas dan kontak langsung dengan hewan yang terjangkit PMK, Vaksinasi PMK agar penularan penyakit ini dapat dihentikan. Salah satu cara mengkonsumsinya adalah bagian kepala kaki jeroan direbus dengan suhu 70 derajat Celcius atau sekitar 30 menit supaya virus lemah dan mati metode pemanasan air mendidih ini merupakan cara yang efektif untuk mengkonsumsi daging hewan ternak yang terindikasi mengidap atau terpapar oleh virus penyakit mulut dan kuku.

Pencegahan penularan pada penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak

melalui metode desinfeksi meliputi asam sitrat asam asetat dan sodium hipoklorit yang meliputi pemutih pakaian seperti Bayclin Pro clean.

Dalam konteks ilmu agama fenomena penyakit mulut dan kuku pada hewan ini Mengacu kepada fatwa MUI Nomor 32 tahun 2022, Tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban pada saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku diantaranya hukum berkorban sunnah muakkad bagi umat Islam yang sudah kembali berakal dan mampu dan saat penyembelihan hewan kurban usai salat Idul Adha dan yang melakukan penyembelihan adalah orang Islam laki-laki dan yang berkorban disunnahkan untuk menyembelih sendiri atau menyaksikan langsung Jika memungkinkan serta hewan yang dijadikan hewan kurban adalah harus sehat secara fisik.

Berdasarkan fatwa MUI Nomor 32 Tahun 2022 tentang hukum hewan kurban yang terkena wabah PMK dibagi menjadi 3 kategori yang pertama adalah sah kategori ringan yaitu hewan kurban yang mengalami gangguan nafsu makan keluar air liur lebih pelepasan ringan pada mukosa hidung rongga mulut dan celah kuku.

Kategori kedua tidak sah kategori berat seperti melepuh pada kuku hingga terlepas dan atau menyebabkan pincang dan menyebabkan kondisi hewan menjadi sangat kurus dan tidak layak untuk dijadikan hewan kurban.

Sedekah jika pernah mengalami gejala klinis kategori berat dan baru sembuh dari penyakit tersebut sesaat setelah melewati rentang waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakan qurban.

Panduan kurban untuk mencegah peredaran Wabah PMK umat Islam yang akan berkorban dan menjual hewan kurban wajib memastikan bahwa hewan yang dijadikan hewan kurban merupakan jenis hewan yang memenuhi syarat sah khususnya dari sisi kesehatan Sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau dalam hal ini adalah Dinas Peternakan dan Rumah Potong Hewan.

kedua panitia Qurban bersama dengan tenaga kesehatan serta perlu mengawasi kondisi kesehatan hewan kurban dan proses pemotongan hingga penanganan daging jeroan dan limbah hewan kurban.

Ketiga lembaga sosial keagamaan memfasilitasi pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dan mengelola dagingnya agar peningkatan sosialisasi dan penyiapan layanan dewan kurban dapat di jembatan ini antara pemilik hewan kurban dan Penerima hewan kurban.

Keempat daging kurban yang didistribusikan dalam bentuk daging segar atau daging olahan panitia Kurban diwajibkan menerapkan prinsip kebersihan dan kesehatan higienis dan sanitasi.

Kelima pemerintah wajib menjamin ketersediaan hewan kurban yang sehat bagi masyarakat serta memberikan pendampingan dan penyediaan penjualan dan pemeliharaan hewan kurban untuk menjamin kesehatan hewan kurban serta menyediakan sarana dan prasarana penyembelihan hewan kurban melalui Rumah Potong Hewan sesuai dengan fatwa MUI nomor 32 Tahun 2022 tentang hukum hewan kurban yang terkena virus atau wabah penyakit mulut dan kuku.

Daftar penyelia halal dan juru sembelih halal (JULEHA) Rumah Potong Hewan di Kabupaten Pamekasan tahun 2023. Berdasarkan informasi dari dinas peternakan Kabupaten Pamekasan bahwa pada masa wabah PMK di Kabupaten Pamekasan,



memiliki 5 Rumah Potong Hewan yang tersebar di 5 Kecamatan. Kecamatan Pamekasan, Kecamatan palengaan, desa banyupelle, Kecamatan Pakong dan Kecamatan Waru.

Tabel 1

Daftar penyelia halal dan juru sembelih halal (JULEHA) Rumah Potong Hewan di Kabupaten Pamekasan tahun 2023

No	RPH	Dokter Hewan Penyelia	Nama Juleha
1	Pamekasan	Drh. Ervin Kusumawardani	Abdul Holik
2	Palengaan	Drh. Bismi Rizka Yuniar	Ahmadi
3	Banyupelle	Drh. Bismi Rizka Yuniar	Puradin
4	Pakong	Drh. Bismi Rizka Yuniar	Rusdi
5	Waru	Drh. Alfainur Muhammad Arif.D. M.Vet	Zainur Rahman

Kesimpulan

Dalam upaya untuk memahami kebijakan pemerintah Pamekasan mengenai pelaksanaan fiqih qurban, terutama dalam konteks Rumah Potongan Hewan (RPH) pada waktu yang bersamaan dengan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK), terdapat beberapa aspek penting yang perlu dieksplorasi, yaitu regulasi pemerintah, implementasi, dan evaluasi dari kebijakan tersebut.

Regulasi pemerintah Pamekasan mengenai penyelenggaraan fiqih qurban dilandasi oleh sejumlah peraturan yang mengatur pelaksanaan ibadah qurban. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah menerbitkan berbagai pedoman yang menjelaskan tata cara pemotongan hewan qurban, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh RPH. Salah satu poin penting dalam regulasi ini adalah penekanan pada aspek kesehatan hewan yang akan dikurbankan, terutama di tengah situasi wabah PMK, yang dapat memengaruhi kualitas dan kesehatan ternak. Selain itu, terdapat ketentuan tentang memastikan bahwa hewan qurban memenuhi standar syariah dan kesehatan yang berlaku agar pelaksanaan ibadah dapat sah dan memenuhi kaidah fiqih.

Implementasi dari regulasi tersebut memerlukan kerjasama yang sinergis antara berbagai pihak, termasuk dinas terkait, lembaga keagamaan, serta masyarakat. Dalam rangka penerapan regulasi tersebut, pemerintah Pamekasan mengadakan sosialisasi ke berbagai kalangan agar masyarakat memahami pentingnya memenuhi syarat kesehatan hewan, tidak hanya untuk ibadah, tetapi juga untuk mencegah penyebaran penyakit. RPH diposisikan sebagai institusi kunci dalam pelaksanaan ini, di mana proses pemotongan dan penanganan hewan dilakukan dengan standar yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk respons terhadap PMK, RPH juga harus menyesuaikan prosedur operasionalnya, termasuk menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat bagi hewan yang akan dipotong.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan qurban juga menjadi sangat crucial. Sebagaimana diketahui, tingginya partisipasi masyarakat dalam berqurban di Pamekasan bukan hanya berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi lokal, tetapi juga memainkan peranan penting dalam



memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian sosial. Pemerintah juga berupaya memfasilitasi masyarakat dalam menyalurkan hewan qurban melalui RPH yang telah ditentukan, untuk menjamin bahwa proses pemotongan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Evaluasi terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan RPH juga sangat penting untuk memastikan efektivitas dari regulasi yang ada. Dalam situasi PMK, pemerintah Pamekasan perlu melakukan pengawasan dan penilaian berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan. Dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti dokter hewan dan masyarakat, evaluasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak dari regulasi yang diterapkan. Apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan harapan dalam melindungi kesehatan hewan dan masyarakat, serta menjaga eksistensi ibadah qurban di tengah tantangan yang ada.

Akhirnya, bahwa regulasi pemerintah Pamekasan dalam pelaksanaan fiqih qurban dan pengelolaan RPH merupakan langkah strategis yang harus dikembangkan lebih lanjut. Berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk wabah PMK, menuntut adanya adaptasi dan kolaborasi di berbagai sektor. Dengan demikian, implementasi dan evaluasi yang berkesinambungan akan menjadi lebih efektif dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan qurban tanpa mengabaikan aspek kesehatan masyarakat dan hewan. Inilah saat yang tepat untuk merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika yang ada, sehingga ibadah qurban tetap dapat dilaksanakan dengan baik dan menjadi berkah bagi semua.

Ucapan Terima kasih

Terimakasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Kementerian Agama RI yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk ikut berperan serta dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian masyarakat (Litapdimas) tahun anggaran 2023 pada klaster Penelitian Pembinaan Kapasitas.

Daftar Referensi

- Abbas, E. W., Winarso, H. P., & Meilina, N. (2019). Religious Activities at Sultan Suriansyah Mosque, Banjarmasin. *The Innovation of Social Studies Journal*, 1(1), 55. <https://doi.org/10.20527/iis.v1i1.1368>
- Anak Agung Putri Isadela Dayana, Rudyanto, M. D., & Suada, I. K. (2019). Aplikasi Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Pada Juru Sembelih Halal Dan Pekerja Pemotong Daging Di Rumah Pemotongan Hewan Mambal Dan Pesanggaran. *Indonesia Medicus Veterinus*, 99. <https://doi.org/10.19087/imv.2019.8.1.99>
- Apriantoro, M. S., Al-Kahfi, M. A. M., & Ananda, W. F. (2023). Penyuluhan Dan Sosialisasi Fatwa MUI No. 32 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku. *Jrce (Journal of Research on Community Engagement)*, 4(2), 68–72. <https://doi.org/10.18860/jrce.v4i2.16969>
- Arif, R., Wicaksono, A., Andriyanto, A., & Sholeh, D. (2021). Peningkatan Peran



- Dewan Kemakmuran Masjid Sebagai Fungsi Edukasi Dalam Pelaksanaan Kurban Di Tengah Pandemi Covid-19. *Agrokreatif Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 67-75. <https://doi.org/10.29244/agrokreatif.7.1.67-75>
- Budiono, N. G., Afni, N., Anidya, D. K., Najibah, S., Manisyah, M., Sudrajat, A. H., Gusthama, R., Akbar, R. I. S., Mahdiansyah, F. L., Sarita, N. R., & Ummah, F. (2023). Edukasi Penyakit Mulut Dan Kuku Serta Pengolahan Daging Pada Masyarakat Desa Pangkal Jaya (Kabupaten Bogor) Untuk Mencegah Penularan Penyakit Pada Hewan Berkuku Belah. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat (Pim)*, 5(1), 10-21. <https://doi.org/10.29244/jpim.5.1.10-21>
- Dwijayanti, S., Piranti, A. S., & Andreas, R. (2022). Pengaruh Buang Air Besar Sembarangan Terhadap Jumlah Escherichia Coli Di Air Sumur Dan Tingkat Kesehatan Masyarakat Desa Karanganyar Gandrungmangu Cilacap. *Buletin Keslingmas*, 41(2), 51-56. <https://doi.org/10.31983/keslingmas.v41i2.8523>
- Firman, A., Trisman, I., & Puradireja, R. H. (2022). Dampak Ekonomi Akibat Outbreak Penyakit Mulut Dan Kuku Pada Ternak Sapi Dan Kerbau Di Indonesia. *Mimbar Agribisnis Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 8(2), 1123. <https://doi.org/10.25157/ma.v8i2.7749>
- Hariati, H., Syamsari, S., Puspitasari, A., & Hardianti, H. (2023). Perilaku Konsumen Dalam Membeli Hewan Kurban Yang Sehat. *J. Ag. Rural Econ.*, 1(1), 40-47. <https://doi.org/10.11594/agre.2023.v1i1.40-47>
- Hasanah, U., Sahlan, M. F. F., & SAS, A. (2024). Analisis Implementasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (E – Government) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. *Journal Softw. Eng. Multimedia*, 2(1), 34-41. <https://doi.org/10.20895/jasmed.v2i1.1344>
- Herman, H., Setianto, Y. A., & Sulistyowati, L. (2023). Pendekatan One Health Manajemen Air Limbah Rumah Pemotongan Hewan Kota Tana Paser. *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*, 11(3), 833-844. <https://doi.org/10.26418/jtllb.v11i3.69708>
- I Made Gede Wijaya Kusuma, Agustina, K. K., & Sukada, I. M. (2023). Persepsi Pedagang Daging Babi Di Pasar Badung Terhadap Pemilihan Tempat Pemotongan Hewan. *Buletin Veteriner Udayana*, 483. <https://doi.org/10.24843/bulvet.2023.v15.i03.p18>
- Julvianita, J., Nurwahida, N., Nabir, Abd. M., Ansar, A., & Subha, R. (2023). Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Penjualan Daging Sapi Studi Kasus Implementasi Prinsip-Prinsip Islam. *Jurnal Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 115-122. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v5i2.2012>
- Khotimah, Y. K., Wibowo, H., Helbawanti, O., & Suryani, H. F. (2024). Dampak Ekonomi Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku Pada Peternak Di Kabupaten Semarang. *Mimbar Agribisnis Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 10(1), 818. <https://doi.org/10.25157/ma.v10i1.12574>
- Mail, D. A. A., Fahmi, N. F., Putri, D. A., & Hakiki, Moh. S. (2021). Kebijakan Pemotongan Sapi Di RPH (Rumah Potong Hewan) Dalam Kaitannya Dengan



- Prinsip Manajemen Halal Dan HACPP (Hazard Analysis Critical Control Point). *Halal Research Journal*, 1(1), 20–38. <https://doi.org/10.12962/j22759970.v1i1.33>
- Nurjanah, S., Rahayu, W. P., & Najib, R. N. (2020). Evaluasi Penerapan Good Manufacturing Practice Dan Sanitation Standard Operating Procedure Pada Rumah Pemotongan Hewan Unggas Di Bogor. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 26(1), 60–68. <https://doi.org/10.18343/jipi.26.1.60>
- Pujiyanti, A., Putro, D. B. W., & Kartikasari, N. A. (2023). Potensi Penularan Leptospirosis Pada Petugas Rumah Pemotongan Hewan Di Kota Salatiga. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas*, 8(1), 25–33. <https://doi.org/10.14710/jekk.v8i1.15122>
- Purba, E., Putriana, A., & Pasaribu, A. R. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Pelayanan Kesehatan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap Di RSUD DR. R.M. Djoelham Binjai Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda (Jipiki)*, 8(1), 77–86. <https://doi.org/10.52943/jipiki.v8i1.1137>
- Rachmadin, G. P., & Fitria, N. (2024). Implementasi Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Penjualan Halal Terhadap Pemotongan Ayam Di Rumah Potong Ayam (RPA) Kabupaten Trenggalek. *Jis*, 2(3), 6–14. <https://doi.org/10.71456/jis.v2i3.909>
- Rahayu, R., Maksum, H., Syukur, S. H., Irfan, Moh., Afandi, A., & Riandhana, T. E. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Rumah Pemotongan Ayam (RPA) Toriniku Di Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu. *Agroland Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 30(1), 80–93. <https://doi.org/10.22487/agrolandnasional.v30i1.1430>
- Rahmi, A., Baharun, A., Handarini, R., Masitoh, Putri, O. F., Pertiwi, P. P. P., Rizal, M., Maman, A., & Herdes, A. F. (2024a). Pelaksanaan Pemotongan Hewan Kurban Saat Wabah Pmk, Lsd, Dan Kewaspadaan PPR Di Indonesia. *Qardhul Hasan Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(3), 317–323. <https://doi.org/10.30997/qh.v9i3.9817>
- Rahmi, A., Baharun, A., Handarini, R., Masitoh, Putri, O. F., Pertiwi, P. P. P., Rizal, M., Maman, A., & Herdes, A. F. (2024b). Pelaksanaan Pemotongan Hewan Kurban Saat Wabah Pmk, Lsd, Dan Kewaspadaan PPR Di Indonesia. *Qardhul Hasan Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(3), 317–323. <https://doi.org/10.30997/qh.v9i3.9817>
- Rohma, M. R., Zamzami, A., Utami, H. P., Karsyam, H. A., & Widianingrum, D. C. (2022). Kasus Penyakit Mulut Dan Kuku Di Indonesia: Epidemiologi, Diagnosis Penyakit, Angka Kejadian, Dampak Penyakit, Dan Pengendalian. *Animpro*, 3, 15–22. <https://doi.org/10.25047/animpro.2022.331>
- Safitri, W., Suzana, R., Susanti, F., Pertiwi, S. R., Rahmi, N., & Fadillah, S. (2024). Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban Di Kota Bukittinggi: Upaya Meningkatkan Kualitas Dan Keamanan Produk Hewani. *Journal of Community Service*, 6(2), 39–45. <https://doi.org/10.56670/jcs.v6i2.284>
- Salurante, T. (2020). Ritual Slaughtering of Livestock in “Aluk Rambu Solo”: *Diegesis Jurnal Teologi*, 5(2), 64–77. <https://doi.org/10.46933/dgs.vol5i264-77>



- Sayuti, M., Purnamasari, A., Pratiwi, A. I., & Fathurohman, F. (2021). Penerapan Halal Logistik Pada Distribusi Daging Sapi Di Kabupaten Karawang. *Jisi Jurnal Integrasi Sistem Industri*, 8(1), 55–65. <https://doi.org/10.24853/jisi.8.1.55-65>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistyati, M., Firman, A., & Hermawan, H. (2024). Karakteristik Kewirausahaan Peternak Sapi Perah Dan Korelasinya Dengan Keberlanjutan Usaha Saat Outbreak PMK (Suatu Kasus Di KPBS Pangalengan Kabupaten Bandung). *Mimbar Agribisnis Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 10(1), 1326. <https://doi.org/10.25157/ma.v10i1.13104>
- Suparni, S., Isnaini, M., & Komalaningsih, S. (2022). Pengelolaan Limbah Infeksius Di Rumah Sakit Pada Masa Pandemi COVID-19 (Literature Review). *Jurnal Kesehatan Metro Sai Wawai*, 15(1), 70–78. <https://doi.org/10.26630/jkmsaw.v15i1.3133>
- Umatin, C., Putri, Y. A., Inayatus, N., & Pertiwi, R. (2022). Sosialisasi Pencegahan Penyakit Mulut Dan Kuku Sebagai Upaya Menjaga Stabilitas Ekonomi Masyarakat. *Journal of Empowerment*, 3(2), 143. <https://doi.org/10.35194/je.v3i2.2690>
- Wardhani, L. D. K., Widhowati, D., & Hidayah, N. (2022). Kasus Fascioliasis Dan Paramphistomosis Pada Pemeriksaan Hewan Kurban Di Masjid Nurul Iman Surabaya. *Jurnal Ilmiah Fillia Cendekia*, 7(2), 141. <https://doi.org/10.32503/fillia.v7i2.2551>